KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DIM RUU Kesehatan Diserahkan ke DPR
Tanggal : Kamis, 06 April 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

DIM RUU Kesehatan Diserahkan ke DPR

Kementerian Kesehatan telah menyerahkan hasil daftar inventarisasi masalah RUU Kesehatan kepada DPR. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan Komisi IX DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kesehatan secara resmi telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Setidaknya terdapat 3.020 DIM pada batang tubuh serta 1.488 DIM pada penjelasan yang telah dirangkum dari 478 pasal yang diusulkan dalam RUU Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, upaya dengar pendapat telah dilakukan Kementerian Kesehatan sebagai sarana pelibatan publik dalam penyusunan RUU Kesehatan. Dari kegiatan sosialisasi dan partisipasi publik yang dilakukan, setidaknya telah diterima 6.011 masukan.

"Dari masukan yang diterima, sebanyak 75 persen ditindaklanjuti, baik untuk DIM maupun dimasukkan ke peraturan pemerintah serta aturan turunan lainnya," kata Budi dalam rapat kerja Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Ia menuturkan, setidaknya ada 25 topik unggulan yang didapatkan dalam dengar pendapat dan sosialisasi RUU Kesehatan. Topik itu, antara lain, terkait rumah sakit, pendayagunaan tenaga kesehatan, aborsi, sistem jaminan sosial nasional, serta kemandirian industri sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Dari hasil DIM yang diusulkan Kementerian Kesehatan, sebanyak 10 undang-undang dicabut dan dua undang-undang diubah. Jumlah itu berbeda dari draf yang sebelumnya diberikan DPR. Dalam draf dari DPR, sebanyak sembilan undang-undang dicabut dan empat undang-undang diubah.

Satu undang-undang yang turut diubah dari DIM yang diusulkan Kementerian Kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Sementara undang-undang yang sebelumnya diusulkan untuk diubah oleh DPR tetapi tidak masuk dalam usulan Kementerian Kesehatan adalah UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Budi mengatakan, substansi RUU Kesehatan disiapkan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, seperti transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi kesehatan. "Substansi RUU ini akan berupaya mendukung peningkatan akses layanan rujukan," ujarnya.

Tak ada target

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang juga ketua panitia kerja pembahasan RUU Kesehatan dari pemerintah mengatakan, masukan publik yang tidak ditindaklanjuti disebabkan topik yang disampaikan tidak relevan dalam pembahasan RUU Kesehatan.

Pembahasan RUU Kesehatan pun diharapkan bisa berjalan dengan baik untuk mendukung upaya transformasi sistem kesehatan di Indonesia.

"Tidak ada target kapan undang-undang ini akan disahkan. Namun, baik pemerintah maupun DPR telah sepakat bahwa undang-undang ini dibahas secara efektif dan efisien sehingga diharapkan bisa segera diimplementasikan," tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menyebutkan, pembahasan RUU Kesehatan akan dilanjutkan. DIM yang telah diserahkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan dipelajari lebih lanjut.

Sebelumnya, Fraksi PKS menolak pembahasan RUU Kesehatan sebagai inisiatif DPR. Hal tersebut disebabkan pembahasan RUU Kesehatan dinilai terlalu terburu-buru dan tidak mengakomodasi usulan dari Fraksi PKS.

"Kami akan pelajari dulu DIM-nya dan akan terus melakukan komunikasi positif dengan pemerintah agar RUU Kesehatan bisa benar-benar mewujudkan pilar reformasi kesehatan. Jadi, jangan sampai menimbulkan persoalan baru," ujar Kurniasih.

Ia menegaskan agar RUU Kesehatan bisa membantu mengatasi persoalan kesehatan yang selama ini belum terakomodasi. Perlindungan melalui jaminan kesehatan pada masyarakat pun harus diperjuangkan secara optimal.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Edy Wuryanto mengatakan, masukan-masukan dari publik masih terbuka untuk disampaikan selama pembahasan RUU Kesehatan berlangsung. Dukungan pun diberikan pada RUU itu selama maksud aturan tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

(TAN)